

ABSTRAK

Pariwisata sudah menjadi industri terbesar yang memperlihatkan pertumbuhan yang konsisten dari tahun ke tahun. Semakin banyaknya minat masyarakat yang mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan pariwisata untuk terus mengembangkan wahana dan juga infrastrukturnya. Pariwisata memiliki beberapa jenis menurut objeknya salah satunya adalah *Marine tourism*. Obyek wisata Banyu Biru terdapat di Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan adalah salah satu jenis wisata *Marine tourism*. Sebagai pelaku usaha obyek wisata banyu biru di kabupaten bangkalan ini harus memenuhi standard operasional pengelolaan, jika tidak dikhawatirkan terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dalam pelaksanaannya karena Perlindungan hukum kepada konsumen dalam pariwisata di indonesia juga masih rendah.

Rumusan masalah yang dibahas pada Penelitian ini adalah Bagaimana implementasi standard pelayanan di obyek wisata banyu biru dan Bagaimana Tinjauan undang - undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan *Maqāṣid Shari'ah* pada obyek wisata banyu biru. Dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan didukung dengan penelitian pustaka (*library research*). Sifat dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan standard pelayanan perlindungan konsumen di obyek wisata air banyu biru ini sesuai dengan UUPK yakni pasal 4 UUPK yang ada pada point (a) dan sesuai dengan pasal 19 UUPK yang berisi tanggung jawab pelaku usaha. Untuk tinjauan *Maqāṣid Shari'ah* kolam renang banyu biru dalam praktik-Nya ada yang sudah sesuai dan masih ada yang belum sesuai dengan lima pokok pemeliharaan kemaslahatan. memelihara agama terdapat dua tingkatan yaitu yang pertama tingkatan *dharūriyat*, tingkatan *dharūriyat* ini telah memenuhi pemeliharaan agama dan yang kedua tingkatan *taḥsīniyyat* yaitu masih belum memenuhi dari pemeliharaan agama, Pemeliharaan yang kedua adalah pemeliharaan jiwa termasuk pada tingkatan *dharūriyat*, Pemeliharaan yang ketiga adalah pemeliharaan akal termasuk pada tingkatan *dharūriyat*, Pemeliharaan yang keempat adalah pemeliharaan keturunan termasuk pada tingkatan *dharūriyat*, Pemeliharaan yang kelima adalah pemeliharaan harta yang terdapat dua tingkatan untuk yang pertama tingkatan *taḥsīniyyat*, tingkatan *taḥsīniyyat* ini telah memenuhi pemeliharaan harta dan yang kedua tingkatan *dharūriyat* yaitu masih belum memenuhi dari pemeliharaan harta.

Kata kunci: Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Maqāṣid Shari'ah*, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Tourism has become the largest industry to show consistent growth from year to year. More interest community that encourages businesses to develop tourism to continue to develop vehicles and infrastructure. Tourism has several types according to the object one of which is Marine tourism. Banyu Biru tourism object is located in Burneh District, Bangkalan Regency is one type of Marine tourism tourism. As a tourist business actor blue banyu in Bangkalan district must meet operational standards management, if it is not feared that events will not occur desired in its implementation because of legal protection to consumers in tourism in Indonesia it is still low.

The formulation of the problems discussed in this thesis is How the implementation of service standards in Blue Banyu tourism objects and How Review of law number 8 of 1999 concerning consumer protection and *Maqāṣid Sharī'ah* on banyu Biru tourism objects. With this type of research used is field research and supported with library research (library research). The nature of this research is research qualitative.

The results of this study conclude the standard of protection services consumers in this blue banyu water tourism object are in accordance with UUPK namely article 4 UUPK in point (a) and in accordance with article 19 of the UUPK that contains business actor's responsibility. For a review of *Maqāṣid Sharī'ah* swimming pool there are blue banyu in his practice that are already appropriate and some are still not in accordance with the five principles of maintaining benefit. maintain religion there are two levels, namely the first level of *dharūriyat*, level this *dharūriyat* fulfills the maintenance of religion and the second level *taḥsīniyyat* that is still not fulfilling from the maintenance of religion, The second maintenance is the maintenance of the soul, including at the level *dharūriyat*, the third maintenance is maintenance of the mind including on *dharūriyat*, the fourth maintenance is the maintenance of offspring including at the level of *dharūriyat*, the fifth maintenance is maintenance of treasure which has two levels for the first level *taḥsīniyyat*, the level of *taḥsīniyyat* has fulfilled the maintenance of the property and the second level of *dharūriyat* is still not fulfilling from maintenance treasure.

Keywords: Consumer Protection Act, *Maqāṣid Sharī'ah*, Legal protection.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
SURAT BEBAS PLAGIASI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaatnya	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Tinjauan Umum mengenai Perlindungan Konsumen, Konsumen Dan Pelaku Usaha	12
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	12
2. Pengertian Konsumen	15
3. Pengertian Pelaku Usaha	17
4. Hak dan Kewajiban Konsumen, Pelaku Usaha	20

B. Objek Wisata.....	24
1. Pengertian Wisata.....	24
2. Jenis Wisata.....	25
3. Dasar Hukum Objek Wisata	27
C. Standard Pelayanan Perlindungan Konsumen	27
D. <i>Maqāṣid Shari'ah</i>	33
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Sifat Penelitian	43
C. Tempat Penelitian.....	43
D. Sumber Data.....	44
1. Data Primer	44
2. Data Sekunder	46
E. Pendekatan Penelitian	46
F. Metode Pengumpulan Data	47
1. Observasi.....	47
2. Foto	48
3. Wawancara.....	48
4. Dokumen	49
G. Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN	51
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	51
1. Profil dan Sejarah Kolam Renang Banyu Biru	51
2. Struktur Organisasi	52
B. Praktik Standard Pelayanan Konsumen pada Objek Wisata Banyu Biru	53
C. Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Perlindungan Bagi konsumen (Studi Kasus Objek Wisata Banyu Biru)	56
D. Tinjauan <i>Maqāṣid Shari'ah</i> pada Objek Wisata Banyu Biru.....	67

BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sumber Data Primer.....	44
Tabel 2 Struktur Organisasi	51

DAFTAR SINGKATAN

KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPer	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
UUPK	: Undang-Undang Perlindungan Konsumen

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Bukti Wawancara

Lampiran 2 Hasil Wawancara dari Narasumber

Lampiran 3 Gambar Narasumber